



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PELAYANAN PUBLIK

Nomor : 100.3.7/19.5539/Hukum

Nomor : 134.4/171/KSB/429.012/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Banyuwangi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **MOHAMAD IRWAN** : Bupati Sigi, berkedudukan di Jalan Poros Palu-Palolo, Area Perkantoran, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS** : Bupati Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 363 ayat (2) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
2. Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja sama dalam rangka Kerja Sama Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang pada pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah melalui kerja sama antar daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas, fungsi, dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi;
- b. Perencanaan Penganggaran;
- c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Pengelolaan Pariwisata;
- e. Program *Smart* Kampung; dan
- f. Bidang Transmigrasi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah masing-masing PIHAK melalui Surat Kuasa, berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi

Alamat : Jalan Poros Palu-Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi
Kota Kabupaten Sigi

Email : setda@sigikab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi

Email : kerjasama.banyuwangikab.go.id

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

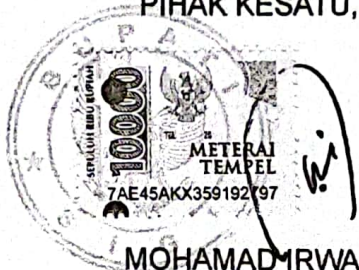
Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam Addendum, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

PIHAK KESATU,

MOHAMAD IRWAN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU